



KOMITE STANDAR
AKUNTANSI PEMERINTAHAN

LAPORAN TAHUNAN

TAHUN 2016

Accountability

Transparency



KOMITE STANDAR
AKUNTANSI PEMERINTAHAN

SAMBUTAN

KETUA KOMITE KONSULTATIF KOMITE STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN

Bapak dan Ibu Anggota Komite Konsultatif, Komite Kerja, Kelompok Kerja KSAP serta para pengguna Standar Akuntansi Pemerintahan.

KSAP saat ini telah berusia 12 tahun sejak pertama kali didirikan pada tahun 2004 melalui penetapan Keputusan Presiden Nomor 84 Tahun 2004. Selama kurun waktu tersebut, KSAP telah berhasil menyusun Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) berbasis Kas Menuju Akrual yang ditetapkan dengan PP Nomor 24 Tahun 2005 serta Standar Akuntansi Pemerintahan berbasis Akrual yang ditetapkan dengan PP 71 Tahun 2010. Standar Akuntansi Pemerintahan tersebut digunakan sebagai dasar penyusunan laporan keuangan oleh Pemerintah Pusat dan pemerintah daerah.

Proses penyusunan standar yang dilakukan oleh KSAP mengikuti proses baku penyusunan (*due process*) yang berlaku. Sebelum ditetapkan sebagai suatu standar, *draft* standar terlebih dahulu disampaikan kepada publik (*limited/public hearing*) untuk memperoleh tanggapan dan masukan dalam rangka penyempurnaan *draft* standar dan selanjutnya dimintakan pertimbangan kepada Badan Pemeriksa Keuangan sebelum standar tersebut diterbitkan.

Sesuai dengan amanat Rapat Komite Konsultatif pada pertengahan tahun 2015 dan *High Level Meeting* pada bulan April 2016, pada tahun 2016 ini KSAP memfokuskan penyusunan Standar Pelaporan Keuangan Pemerintah Desa yang saat ini sedang dalam proses penetapan Peraturan Pemerintah.



Kami mengucapkan terima kasih kepada anggota Komite Konsultatif yang telah memberikan arahan dan masukan, Komite Kerja dan Kelompok Kerja yang telah bekerja secara profesional dalam menyusun dan mengembangkan standar, serta kepada Sekretariat KSAP dan pihak lain yang telah mendukung keberhasilan penyusunan dan implementasi Standar Akuntansi Pemerintahan.

Jakarta, Januari 2017

Ketua Komite Konsultatif

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Marwanto Harjowiryo', written over a horizontal line.

Marwanto Harjowiryo

PENGANTAR

KETUA KOMITE KERJA

KOMITE STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN

Komite Standar Akuntansi Pemerintahan (KSAP) adalah sebuah komite independen yang bertanggung jawab langsung kepada Presiden melalui Menteri Keuangan. KSAP memiliki tugas untuk menyusun Standar Akuntansi Pemerintahan sebagai pedoman dalam penyusunan pertanggungjawaban keuangan baik oleh Pemerintah Pusat maupun pemerintah daerah.

Sesuai dengan amanat rapat Komite Konsultatif pada pertengahan tahun 2015 dan *High Level Meeting* pada bulan April 2016, pada tahun 2016 ini, KSAP memfokuskan penyusunan Standar Pelaporan Keuangan Pemerintah Desa. *Draft* standar tersebut telah dimintakan pendapat publik (*public hearing*) pada tanggal 14 Desember 2016. Saat ini, *draft* standar tersebut tengah dalam proses penetapan Peraturan Pemerintah.

Selain penyusunan Standar Pelaporan Keuangan Pemerintah Desa, KSAP juga menyusun *Draft* Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan Aset Tak Berwujud. *Draft* standar tersebut juga telah dimintakan pendapat terbatas (*limited public hearing*) pada tanggal 6 Desember 2016.

Pada tahun 2016, KSAP telah berhasil menyelesaikan 3 (tiga) Buletin Teknis Standar Akuntansi Pemerintahan, yaitu Buletin Teknis Akuntansi Transfer Berbasis Akrua, Buletin Teknis Akuntansi Pendapatan Non-Perpajakan, serta Buletin Teknis Akuntansi Pendapatan Perpajakan.

Selain menyusun standar, KSAP juga menyusun Bunga Rampai Studi Kasus Akuntansi Pemerintahan yang merupakan kumpulan jawaban atas pertanyaan yang diajukan kepada KSAP terkait permasalahan dalam implementasi standar akuntansi baik di lingkup Pemerintah Pusat maupun pemerintah daerah.

Laporan Tahunan KSAP Tahun 2016 ini kami susun sebagai media akuntabilitas dan transparansi atas pelaksanaan tugas dan kegiatan KSAP Tahun 2016 kepada para pemangku kepentingan. Laporan ini memuat rencana kegiatan, pelaksanaan kegiatan, dan capaian KSAP selama kurun waktu tahun 2016.



Kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada para anggota Komite Konsultatif, Komite Kerja, Kelompok Kerja, dan Sekretariat KSAP yang telah mencurahkan pikiran dan tenaganya untuk KSAP.

Penghargaan tertinggi juga kami sampaikan kepada berbagai pihak khususnya Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, Kementerian Keuangan, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi, Kementerian Negara/Lembaga, pemerintah daerah, yang selama tahun 2016 telah membantu dan mendorong suksesnya proses penyusunan standar dan implementasinya.

Jakarta, Januari 2017
Ketua Komite Kerja,

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Binsar H. Simanjuntak', written over a horizontal line.

Binsar H. Simanjuntak

	Sambutan Ketua Komite Konsultatif	1
	Pengantar Ketua Komite Kerja	2
	Daftar Isi	3
	Daftar Tabel	3
BAB I	Pendahuluan	
	A. Organisasi dan Kedudukan KSAP	5
	B. Tugas Pokok KSAP	6
BAB II	Rencana Strategis KSAP Tahun 2015 – 2019	
	A. Latar Belakang	9
	B. Dasar Hukum	10
	C. Visi	10
	D. Misi	10
	E. Nilai Dasar	10
	F. Tujuan Strategis	10
	G. Sasaran Strategis	11
	H. Kegiatan Strategis	11
BAB III	Rencana Kerja & Capaian KSAP Tahun 2016	
	Rencana Kerja 2016	
	A. Kondisi Umum	13
	B. Rencana Kerja	14
	Capaian Tahun 2016	
	A. Capaian Kinerja	17
	B. Pelaksanaan Kegiatan	17
	C. Aspek Keuangan	28
	D. Lain-lain	28
	E. Kendala dan Strategi Pemecahannya	28
BAB IV	Rencana Kerja Tahun 2017	29
BAB V	Penutup	32

Tabel I	: Bunga Rampai Studi Kasus Akuntansi Pemerintahan Tahun 2016 (untuk Periode bulan Januari s.d. Juni)	23
Tabel II	: Bunga Rampai Studi Kasus Akuntansi Pemerintahan Tahun 2016 (untuk Periode bulan Juli s.d. Desember)	24
Tabel III	: Rekapitulasi Kegiatan KSAP Tahun 2016	27
Tabel IV	: Rincian dan Realisasi Belanja KSAP Tahun Anggaran 2016	28



BAB I

PENDAHULUAN



Dalam rangka mewujudkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara/daerah, pemerintah wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan APBN/APBD berupa laporan keuangan. Bentuk dan isi laporan keuangan disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Sesuai dengan ketentuan Pasal 32 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, SAP disusun oleh Komite Independen yaitu Komite Standar Akuntansi Pemerintahan (KSAP). Ketentuan ini diatur lebih lanjut dalam Pasal 57 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 yang menyatakan bahwa KSAP dibentuk dengan Keputusan Presiden (Keppres). Untuk memenuhi ketentuan tersebut telah diterbitkan Keputusan Presiden Nomor 84 Tahun 2004 tentang Pembentukan Komite Standar Akuntansi Pemerintahan pada tanggal 5 Oktober 2004 sebagaimana diubah terakhir dengan Keppres Nomor 30 tahun 2016.

A. Organisasi dan Kedudukan KSAP

KSAP yang dibentuk berdasarkan Keppres Nomor 84 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Keppres Nomor 30 Tahun 2016 adalah organisasi yang bersifat independen. Independensi tersebut meliputi keanggotaan, mekanisme dalam pelaksanaan pekerjaan, dan proses penyusunan (*due process*) Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP). KSAP beranggotakan kalangan profesional yang berasal dari lingkungan pemerintah, praktisi akuntansi

pemerintah, asosiasi profesi akuntan, dan akademisi yang kompeten di bidang akuntansi sektor publik. Dalam melaksanakan tugasnya, KSAP dapat bekerja sama dengan lembaga pemerintah, swasta, dan lembaga pendidikan atau pihak terkait lainnya.

Secara lengkap susunan Komite Konsultatif dan Komite Kerja KSAP sesuai Keppres Nomor 30 Tahun 2016 adalah:



Komite Konsultatif

- 1. Direktur Jenderal Perbendaharaan, Kementerian Keuangan**
sebagai Ketua merangkap Anggota
- 2. Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah, Kementerian Dalam Negeri**
sebagai Wakil Ketua merangkap Anggota
- 3. Ketua Dewan Pengurus Nasional Ikatan Akuntan Indonesia (IAI)**
Anggota
- 4. Prof. Dr. Mardiasmo, SE., Ak., MBA**
Anggota
- 5. Sonny Loho, Ak. MPM**
Anggota.



Komite Kerja



1



2



3

1. **Dr. Binsar H. Simanjuntak, CMA., CertIPSAS**
Ketua merangkap Anggota

2. **Sumiyati, Ak., MFM.**
Wakil Ketua merangkap Anggota

3. **Firmansyah N. Nazaroedin, Ak., MSc.**
Sekretaris merangkap Anggota



4



5



6

4. **Dr. Jan Hoesada, Ak., MM.**
Anggota

5. **Yuniar Yanuar Rasyid, Ak., MM.**
Anggota

6. **Dr. Dwi Martani, CA., CPA., CertIPSAS**
Anggota



7



8



9

7. **Drs. Hamdani, MM, MSi, Ak., CA., CertIPSAS**
Anggota

8. **Amdi Very Dharma, Ak., M.Acc.**
Anggota

9. **Chalimah Pujihastuti, SE., Ak., MAFIS.**
Anggota

B. Tugas Pokok KSAP

Berdasarkan Keppres Nomor 30 Tahun 2016, KSAP bertugas mempersiapkan, merumuskan dan menyusun konsep Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (RPP SAP). SAP mengatur prinsip-prinsip akuntansi yang wajib dipatuhi dalam penyajian laporan keuangan oleh Pemerintah Pusat dan pemerintah daerah.

Komite Standar Akuntansi Pemerintahan terdiri dari Komite Konsultatif dan Komite Kerja. Komite Konsultatif bertugas memberi konsultasi dan/atau pendapat dalam rangka perumusan konsep RPP SAP. Komite Kerja bertugas menyusun konsep RPP Standar Akuntansi Pemerintahan. Dalam pelaksanaan tugasnya Komite Kerja berkonsultasi dan dapat meminta pendapat dari Komite Konsultatif.

Dalam menyiapkan, merumuskan, dan menyusun RPP SAP, Komite Kerja melakukan proses penyiapan standar (*due process*) yang cermat sesuai dengan praktik penyusunan standar yang baik (*best practices*). Dalam rangka membantu pelaksanaan tugas KSAP, Komite Kerja KSAP membentuk Kelompok Kerja yang tata kerja serta keanggotaannya ditetapkan oleh Ketua Komite Kerja.

Kelompok Kerja periode tahun 2016 dibentuk dengan KEP-05/K.1/KSAP/III/2016 tanggal 8 Maret 2016 yang di ubah dengan KEP-07/K.1/KSAP/III/2016 tanggal 24 Agustus 2016 yang beranggotakan 30 orang dan berasal dari berbagai lembaga. Susunan keanggotaan kelompok kerja tersebut sebagai berikut:

Susunan keanggotaan kelompok kerja tersebut sebagai berikut:

1. **Edward U.P. Nainggolan, Ak., M.Ak.,** Ketua merangkap Anggota
2. **Mega Meilistya, SE.Ak., MBA.,** Wakil Ketua merangkap Anggota
3. **Moh. Hatta, Ak., MBA,** Anggota
4. **Drs. M. Agus Kristianto, Ak., MA,** Anggota
5. **Yulia Candra Kusumarini, S.Sos, SE., MM.,** Anggota
6. **Hamim Mustofa, Ak., CA.,** Anggota
7. **Hasanuddin, Ak., M., Ak., CA.,** Anggota
8. **Heru Novandi, SE, Ak., CA.,** Anggota
9. **Muliani Sulya Fajarianti., SE., M.Ec.Dev., CA.,** Anggota
10. **Zulfikar Aragani, SE. MM.,** Anggota
11. **Rahmat Mulyono, SE, Ak., M.Acc., CA., CertIPSAS,** Anggota
12. **Mugiya Wardhani, SE, Ak., MM,** Anggota
13. **Lucia Widiarsanti, SE, M.Si., CFE, CA., CertIPSAS,** Anggota
14. **Dr. Mei Ling, SE, Ak., MBA, CA., CertIPSAS,** Anggota
15. **Jamason Sinaga, Ak., SIP., CA.,** Anggota
16. **Kadek Imam Eriksiawan M.Sc., Ak., M.Prof. Acc., BAP, CA., CertIPSAS,** Anggota
17. **Slamet Mulyono, SE., Ak., M.Prof. ACC.,** Anggota
18. **Joni Afandi, SE., Ak., M.Si., CA., CertIPSAS,** Anggota
19. **Budiman, SST., SE., MBA., Ak., CA.,** Anggota
20. **Joko Supriyanto, SST.Ak., M.Ak., CA., CertIPSAS,** Anggota
21. **Mauritz Cristianus Raharjo Meta, SST., M.Ak., CertIPSAS,** Anggota
22. **Endah Martiningrum, SE.Ak., MBA., CA.,** Anggota
23. **Dwinanto, SE. Ak.,** Anggota
24. **Isa Ashari Kuswandono, SE. Ak., M.Ak., CA.,** Anggota
25. **Dr. Ratna Wardhani, SE., M.Si., Ak., CA., CGMA., CertIPSAS,** Anggota
26. **Ananto Budiono, SE.,** Anggota.
27. **Fadil Fabian Massarapa, SST., Ak., MSE., MA.,** Anggota
28. **Rahadian Widagdo, SST., Ak., M.Sc., CertIPSAS,** Anggota.

Selain itu, KSAP juga dibantu oleh Sekretariat KSAP, yang susunan organisasi serta tata kerjanya ditetapkan oleh Menteri Keuangan berdasarkan usulan dari Komite Konsultatif. Berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan (KMK) Nomor 92/KM.5/2016 tanggal 15 Februari 2016 tentang Sekretariat Komite Standar Akuntansi Pemerintahan, susunan keanggotaan Sekretariat adalah sebagai berikut:

1. **Joni Afandi,** Ketua merangkap Anggota
2. **Joko Supriyanto,** Wakil Ketua merangkap Anggota
3. **Zulfikar Aragani,** Anggota
4. **Aldo Maulana A,** Anggota
5. **Harunsyah Hutagalung,** Anggota
6. **Siti Syarifah,** Anggota
7. **Khairul Syawal,** Anggota
8. **Wakhid Fatwan,** Anggota
9. **Nia Esti Wulansari,** Anggota
10. **Arsyil A'zim,** Anggota



BAB II

RENCANA STRATEGIS KSAP TAHUN 2015–2019



Dalam rangka mendukung implementasi SAP serta pengembangan SAP, berikut rencana strategis KSAP untuk periode tahun 2015 - 2019.

A. Latar Belakang

Dalam rangka transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan akuntansi pemerintahan, serta peningkatan kualitas laporan keuangan Pemerintah Pusat dan pemerintah daerah, diperlukan adanya Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang berlaku untuk Pemerintah Pusat dan pemerintah daerah.

Untuk memenuhi amanat UU Nomor 17 Tahun 2003 dan UU Nomor 1 Tahun 2004, telah diterbitkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2004 tentang Komite Standar Akuntansi Pemerintahan pada tanggal 5 Oktober 2004, yang telah diubah dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2005 tanggal 4 Januari 2005, kemudian untuk kedua kalinya dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2009 tanggal 2 Maret 2009 dan terakhir diubah dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2016 tanggal 5 September 2016.

KSAP bertugas menyiapkan Rancangan Peraturan Pemerintah tentang SAP sebagai prinsip-prinsip akuntansi yang wajib diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan Pemerintah Pusat dan/atau pemerintah daerah. Dalam pelaksanaan tugas sehari-hari, KSAP melaporkan kegiatannya secara berkala kepada Menteri Keuangan. KSAP bertanggung jawab kepada Presiden melalui Menteri Keuangan.

Dalam penyusunan SAP, KSAP menetapkan proses penyiapan standar dan meminta pertimbangan mengenai substansi standar kepada Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Proses penyiapan standar dimaksud mencakup langkah-langkah yang perlu ditempuh secara cermat (*due process*) agar dihasilkan standar yang objektif dan bermutu. Terhadap pertimbangan yang diterima dari BPK, KSAP memberikan tanggapan, penjelasan, dan/atau melakukan penyesuaian sebelum SAP ditetapkan menjadi peraturan pemerintah.

Sesuai dengan ketentuan peralihan UU Nomor 17 Tahun 2003 dan UU Nomor 1 Tahun 2004, pengakuan dan pengukuran pendapatan dan belanja berbasis akrual (*accrual basis accounting*) dilaksanakan selambat-lambatnya dalam 5 (lima) tahun setelah UU Nomor 17 Tahun 2003 ditetapkan atau pada tahun anggaran 2008. Selama pengakuan dan pengukuran pendapatan dan belanja berbasis akrual belum dilaksanakan, digunakan pengakuan dan pengukuran berbasis kas menuju akrual. Untuk memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan tersebut dan dalam rangka menuju penerapan *accrual basis accounting*, selanjutnya KSAP menyusun SAP berbasis akrual yang telah ditetapkan dengan PP Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan pada tanggal 22 Oktober 2010.

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 merupakan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) berbasis akrual dan secara implisit memberikan mandat kepada KSAP untuk mengembangkan SAP. Hal ini tertuang dalam pasal 5 ayat (1) yang menyatakan bahwa dalam hal diperlukan perubahan terhadap PSAP sebagaimana dimaksud

STRATEGIC PLANNING



dalam Pasal (4) ayat (2), perubahan tersebut diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan setelah mendapat pertimbangan dari Badan Pemeriksa Keuangan. Penjelasan pasal 5 ayat (1) menyatakan bahwa yang dimaksud dengan "perubahan" adalah penambahan, penghapusan, atau penggantian satu atau lebih PSAP.

B. Dasar Hukum

Dasar hukum Komite Standar Akuntansi Pemerintahan (KSAP) adalah:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010, tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;
6. Keputusan Presiden Nomor 84 Tahun 2004 tentang Komite Standar Akuntansi Pemerintahan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Keppres Nomor 30 Tahun 2016 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Presiden Nomor 84 Tahun 2004 tentang Komite Standar Akuntansi Pemerintahan.

C. Visi

KSAP memiliki misi sebagai berikut:

"Mendukung terwujudnya pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan negara yang akuntabel dan transparan melalui Standar Akuntansi Pemerintahan yang berkualitas".

D. Misi

Misi Utama KSAP adalah:

1. Mewujudkan Standar Akuntansi Pemerintahan yang andal dan diterima secara umum.
2. Mendorong terwujudnya entitas pemerintah yang mampu menghasilkan laporan keuangan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.
3. Mendorong pihak-pihak yang berkepentingan mampu memahami dan memanfaatkan informasi keuangan pemerintah.

E. Nilai Dasar

Dalam melaksanakan misinya KSAP menjaga nilai-nilai dasar sebagai berikut:

• Independen

Anggota KSAP menjunjung tinggi independensi, baik secara kelembagaan, organisasi, maupun individu demi kepentingan semua pihak.

• Profesionalisme

Anggota KSAP membangun nilai profesionalisme dengan menerapkan prinsip kehati-hatian, ketelitian, dan kecermatan, serta berpedoman pada kode etik yang berlaku.

• Demokratis

Anggota KSAP menjunjung prinsip-prinsip demokrasi dengan mengedepankan kemufakatan dalam pengambilan keputusan.

• Universal

Anggota KSAP membangun Standar Akuntansi Pemerintahan dengan bersikap objektif dengan mengedepankan universalitas agar dapat diterapkan oleh semua entitas pelaporan dan diterima oleh para pemangku kepentingan.

F. Tujuan Strategis

Dari visi dan misi di atas, KSAP menetapkan tujuan-tujuan berikut ini:

1. Menyusun standar akuntansi sesuai dengan peraturan perundang-undangan, praktik dan wacana akuntansi paling mutakhir di Indonesia maupun di lingkungan internasional.
2. Membantu entitas pelaporan menghasilkan laporan keuangan sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan.
3. Membangun dan meningkatkan pemahaman masyarakat atas manfaat informasi laporan keuangan yang disusun sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.
4. Meningkatkan profesionalisme dan menjaga independensi Komite Standar Akuntansi Pemerintahan.

G. Sasaran Strategis

1. Tersedianya Standar Akuntansi Pemerintahan Indonesia yang dapat diterapkan oleh entitas pelaporan dan memenuhi azas transparansi dan akuntabilitas.
2. Tersedianya interpretasi dan buletin teknis standar akuntansi pemerintahan yang dibutuhkan para pemangku kepentingan.
3. Terbangunnya kesamaan visi untuk peningkatan akuntabilitas keuangan pemerintah dengan lembaga-lembaga Pemerintah Pusat dan pemerintah daerah.
4. Meningkatkan ketaatan entitas pelaporan keuangan terhadap standar akuntansi pemerintahan.
5. Meningkatkan Profesionalisme anggota KSAP.
6. Terbangunnya komunikasi dan koordinasi KSAP dengan para pemangku kepentingan.

H. Kegiatan Strategis

1. Penyusunan Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan.
2. Penyusunan Interpretasi Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan.
3. Penyusunan Buletin Teknis Standar Akuntansi Pemerintahan.
4. Penyusunan Bunga Rampai Studi Kasus Akuntansi Pemerintahan.
5. *Limited Hearing* Standar Akuntansi Pemerintahan.
6. *Public Hearing* Standar Akuntansi Pemerintahan.
7. *Training of Trainers/Workshop/Sosialisasi* awal PSAP dan Buletin Teknis Standar Akuntansi Pemerintahan.
8. Permintaan Pertimbangan PSAP ke Badan Pemeriksa Keuangan.
9. Pelayanan publik terkait akuntansi pemerintahan.
10. Pengembangan sumber daya manusia KSAP
11. Pemeliharaan *Website* KSAP (www.ksap.org).
12. Penyelenggaraan *Helpdesk* KSAP.
13. Komunikasi publik.
14. Audiensi dengan Komite Konsultatif dan/atau Menteri Keuangan.
15. Penyelenggaraan Kesekretariatan.



BAB III

RENCANA KERJA & CAPAIAN KSAP TAHUN 2016



A. Kondisi Umum

Sesuai amanat UU Nomor 17 Tahun 2003 yang antara lain menyebutkan bahwa laporan keuangan pemerintah disusun berdasarkan akuntansi yang standarnya disusun oleh komite standar yang independen, Pemerintah telah membentuk Komite Standar Akuntansi Pemerintah (KSAP). Berdasarkan Keputusan Presiden, Komite Standar Akuntansi Pemerintah (KSAP) mempunyai tugas untuk mempersiapkan, merumuskan dan menyusun konsep Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (RPP SAP) yang mengatur prinsip-prinsip akuntansi yang wajib dipatuhi dalam penyajian laporan keuangan oleh Pemerintah Pusat dan pemerintah daerah.

Proses penyusunan standar dilakukan melalui serangkaian tahapan kegiatan (*due process*). *Due process dimaksud* meliputi tahapan-tahapan sebagai berikut:

- **Identifikasi Topik untuk Dikembangkan Menjadi Standar**
Tahap ini merupakan proses pengidentifikasian topik-topik akuntansi dan pelaporan keuangan yang memerlukan pengaturan dalam bentuk pernyataan standar akuntansi pemerintahan.
- **Pembentukan Kelompok Kerja (Pokja) di dalam KSAP**
KSAP dapat membentuk pokja yang bertugas membahas topik-topik yang telah disetujui. Keanggotaan Pokja ini berasal dari berbagai instansi yang kompeten di bidangnya.
- **Riset Terbatas oleh Kelompok Kerja**
Untuk pembahasan suatu topik, Pokja melakukan riset terbatas terhadap literatur-literatur, standar akuntansi yang berlaku di berbagai negara, praktik-praktik akuntansi yang sehat (*best practices*), peraturan-peraturan dan sumber-sumber lainnya yang berkaitan dengan topik yang akan dibahas.
- **Penulisan Draf SAP oleh Kelompok Kerja**
Berdasarkan hasil riset terbatas dan acuan lainnya, Pokja menyusun draf SAP. Draf yang telah selesai disusun selanjutnya dibahas oleh Pokja.
- **Pembahasan Draf oleh Komite Kerja**
Draf yang telah disusun oleh pokja dibahas oleh anggota Komite Kerja. Pembahasan diutamakan pada substansi dan implikasi penerapan standar. Dengan pendekatan ini diharapkan draf tersebut menjadi standar akuntansi yang berkualitas. Pembahasan ini tidak menutup kemungkinan terjadi perubahan-perubahan dari draf awal yang diusulkan oleh Pokja. Pada tahap ini, Komite Kerja juga melakukan diskusi dengan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk menyamakan persepsi.
- **Pengambilan Keputusan Draf untuk Dipublikasikan**
Komite Kerja berkonsultasi dengan Komite Konsultatif untuk pengambilan keputusan peluncuran draf publikasian SAP.
- **Peluncuran Draf SAP (Exposure Draft)**
KSAP melakukan peluncuran draf SAP dengan mengirimkan draf SAP kepada stakeholders, antara lain masyarakat, legislatif, lembaga pemeriksa, dan instansi terkait lainnya untuk memperoleh tanggapan.
- **Dengar Pendapat Publik Terbatas (Limited Public Hearing) dan Dengar Pendapat Publik (Public Hearings)**
Dengar pendapat dilakukan dua tahap yaitu dengar pendapat publik terbatas dan dengar pendapat publik. Dengar pendapat publik terbatas dilakukan dengan mengundang pihak-pihak dari kalangan akademisi, praktisi, pemerhati akuntansi pemerintahan, dan masyarakat yang berkepentingan terhadap SAP untuk memperoleh tanggapan dan masukan dalam rangka penyempurnaan draf publikasian.

Dengar pendapat publik merupakan proses dengar pendapat dengan masyarakat yang berkepentingan terhadap SAP. Tahapan ini dimaksudkan untuk meminta tanggapan masyarakat terhadap draf SAP.

B. Rencana Kerja Tahun 2016

- **Pembahasan Tanggapan dan Masukan terhadap Draft SAP**

KSAP melakukan pembahasan atas tanggapan/masukan yang diperoleh dari dengar pendapat publik terbatas, dengar pendapat publik dan masukan lainnya dari berbagai pihak untuk menyempurnakan draf SAP.

- **Finalisasi Standar**

Dalam rangka finalisasi draf SAP, KSAP memperhatikan pertimbangan dari BPK. Disamping itu, tahap ini merupakan tahap akhir penyempurnaan substansi, konsistensi, koherensi maupun bahasa. Finalisasi setiap PSAP ditandai dengan penandatanganan draf PSAP oleh seluruh anggota KSAP.

Tahun 2016 merupakan tahun lanjutan implementasi SAP Berbasis Akrua. KSAP senantiasa siap mendukung suksesnya implementasi SAP Berbasis Akrua baik dengan melakukan pengembangan SAP Berbasis Akrua dengan melengkapi dengan Standar baru maupun dengan petunjuk-petunjuk teknis. Dukungan KSAP juga diwujudkan dalam memberikan solusi atas permasalahan para pemangku kepentingan melalui surat konsultasi maupun pemateri dalam kegiatan sosialisasi SAP Berbasis Akrua.

Pada tahun 2016, KSAP merencanakan melakukan kegiatan sebagai berikut:

- **Penyusunan Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP)**

Pada tahun 2016 ini, KSAP merencanakan menyusun beberapa Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP) dalam rangka mendukung implementasi SAP Berbasis Akrua (Lampiran I PP Nomor 71 Tahun 2010). Topik-topik yang dipilih berdasarkan prioritas kebutuhan pelaksanaan pengelolaan keuangan negara di Pemerintah Pusat maupun pemerintah daerah. PSAP ini disusun untuk memberikan arahan/pedoman terkait pertanggungjawaban keuangan negara. Indikator kinerja kegiatan ini adalah telah diterbitkannya PSAP.

- **Penyusunan Interpretasi Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan**

Interpretasi Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan adalah penjelasan, klarifikasi dan uraian lebih lanjut atas PSAP. Topik-topik yang dipilih berdasarkan prioritas kebutuhan akan keseragaman penafsiran atas suatu PSAP, karena IPSAP dimaksudkan untuk menjelaskan lebih lanjut topik tertentu guna menghindari salah tafsir pengguna PSAP. Indikator kinerja kegiatan ini adalah telah diterbitkannya IPSAP.

- **Penyusunan Buletin Teknis Standar Akuntansi Pemerintahan**

KSAP di Tahun 2016 ini merencanakan menyusun beberapa buletin teknis dalam rangka mendukung implementasi SAP Berbasis Akrua. Topik-topik yang dipilih berdasarkan prioritas kebutuhan para *stakeholders*. Buletin teknis disusun untuk memberikan arahan/pedoman teknis penerapan PSAP maupun IPSAP. Indikator kinerja kegiatan ini adalah telah diterbitkannya Buletin Teknis.



- **Sosialisasi, *Public Hearing* dan *Limited Public Hearing* SAP Berbasis Akrual dan Buletin Teknis Baru SAP Berbasis Akrual**

Pada tahun 2016, KSAP direncanakan akan mengadakan sosialisasi SAP Berbasis Akrual dan buletin teknis baru SAP Berbasis Akrual. Dengan diadakannya kegiatan ini, diharapkan para pengguna SAP dapat memahami dan mampu menerapkannya dalam penyusunan laporan keuangan. Selain itu, pada tahun 2016, KSAP juga merencanakan mengadakan *Limited Public Hearing* serta *Public Hearing* mengenai Draf Bultek SAP Berbasis Akrual yang sedang dalam proses penyusunan.

Limited Public Hearing atau dengar pendapat publik terbatas dilakukan dengan mengundang pihak-pihak dari kalangan akademisi, praktisi, pemerhati akuntansi pemerintahan, dan masyarakat yang berkepentingan terhadap SAP untuk memperoleh tanggapan dan masukan dalam rangka penyempurnaan draft SAP.

Public Hearing atau dengar pendapat publik merupakan proses dengar pendapat dengan masyarakat yang berkepentingan terhadap SAP. Tahapan ini dimaksudkan untuk meminta tanggapan masyarakat terhadap draft SAP.

- **Pengembangan Sumber Daya Manusia KSAP**

Untuk menunjang pelaksanaan tugasnya, khususnya dalam menyusun SAP Berbasis Akrual, KSAP perlu meningkatkan kemampuan personalnya. Selain melakukan pengkajian standar dan praktik akuntansi baik internasional maupun di Indonesia, KSAP juga mempunyai rencana mengirim para anggotanya untuk mengikuti seminar/kongres/konferensi baik di dalam maupun di luar negeri.

- **Pemeliharaan *Website* KSAP**

Sejak tahun 2004, KSAP telah membuat website KSAP (www.ksap.org) yang berguna untuk mengkomunikasikan kepada publik mengenai kondisi, kegiatan dan output KSAP. Agar *website* tersebut tetap mengkomunikasikan informasi yang up to date yang berkaitan dengan KSAP kepada publik, maka KSAP perlu memelihara *website*-nya.

- **Pemeliharaan Helpdesk KSAP dan Penyusunan Bunga Rampai Studi Kasus Akuntansi Pemerintahan**

Untuk membantu para pengguna SAP dalam memahami maupun menerapkan SAP, KSAP membentuk *helpdesk* yang akan menampung pertanyaan-pertanyaan/kesulitan-kesulitan yang dialami para pengguna SAP, KSAP akan berusaha memberikan pemecahannya. Diharapkan dari penyelenggaraan *helpdesk* ini akan dibuat suatu Buku *Frequently Asked Question (FAQ)*/Buku Bunga Rampai Studi Kasus Akuntansi Pemerintahan yang memuat pertanyaan/permasalahan dan jawaban/pemecahan permasalahan seputar implementasi SAP.

- **Pelayanan Publik**

Pelayanan publik ini ditujukan untuk memberikan pelayanan yang berupa pengajaran, konsultasi, dan lain-lain kepada instansi pemerintah pusat/daerah, lembaga pendidikan, dan lembaga publik lainnya.

- **Lain-lain (Penyelenggaraan Kesekretariatan)**

Kesekretariatan KSAP bertugas memberikan dukungan administratif KSAP dalam rangka pelaksanaan kegiatan KSAP dan melaksanakan tugas-tugas kesekretariatan lainnya. Susunan organisasi serta tata kerja sekretariat KSAP ditetapkan oleh Menteri Keuangan berdasarkan usulan dari Komite Konsultatif.



CAPAIAN KSAP 2016



A. Capaian Kinerja

KSAP mempunyai kewajiban untuk mengawal implementasi agar berjalan dengan sukses. Tahun 2016, KSAP fokus pada Implementasi SAP Akrual. Penyiapan peraturan di bidang SAP dan turunannya, yaitu interpretasi SAP dan buletin teknis SAP menjadi sebuah keharusan dan merupakan ranah KSAP.

Pada Tahun 2016 KSAP menerbitkan buletin teknis, menyusun draft Pernyataan SAP, melakukan layanan publik berupa konsultasi permasalahan implementasi SAP serta sebagai narasumber dalam kegiatan sosialisasi yang diadakan baik oleh Pemerintah Pusat maupun pemerintah daerah dan kegiatan lainnya.

Ringkasan capaian kinerja KSAP pada tahun 2016 adalah:

1. Menyusun 5 (lima) draf Pernyataan Standar;
2. Menetapkan 3 (tiga) buletin teknis SAP;
3. Menetapkan 1 (satu) Interpretasi SAP;
4. Memroses penetapan Revisi PSAP 06 tentang Investasi melalui RPMK;
5. Melakukan 4 (empat) *Limited Hearing* dan 1 (satu) *Public Hearing*;
6. Finalisasi penyusunan 3 (tiga) draf buletin teknis;
7. Mendukung Sosialisasi SAP, sebagai narasumber pada beberapa Kementerian/Lembaga, Pemda, dan Perguruan Tinggi, dan
8. Melayani publik menjawab pertanyaan-pertanyaan terkait permasalahan akuntansi pemerintahan baik dari pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Tahun 2016 tercatat KSAP telah menerima dan menjawab surat konsultasi implementasi SAP sebanyak 25 (dua puluh lima) surat.

B. Pelaksanaan Kegiatan

1 Penyusunan Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan

Dalam tahun 2016, KSAP menyusun 5 (lima) buah *draft* PSAP, yaitu:

1. *Draft* Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan tentang Aset Tak Berwujud;
2. *Draft* Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan tentang Akuntansi Pengaturan Bersama;
3. *Draft* Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan tentang Akuntansi Dana untuk Entitas Non Pemerintah Penerima Dana APBN/D;
4. *Draft* Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan tentang Peristiwa Setelah Periode Pelaporan; dan
5. *Draft* Standar Pelaporan Keuangan Pemerintah Desa.

Disamping itu, KSAP telah menyelesaikan Revisi PSAP 06 tentang Akuntansi Investasi yang telah ditetapkan dengan PMK No. 223/PMK.05/2016 tentang PSAP Berbasis Akrual Nomor 06 tentang Akuntansi Investasi (Revisi 2016).

2

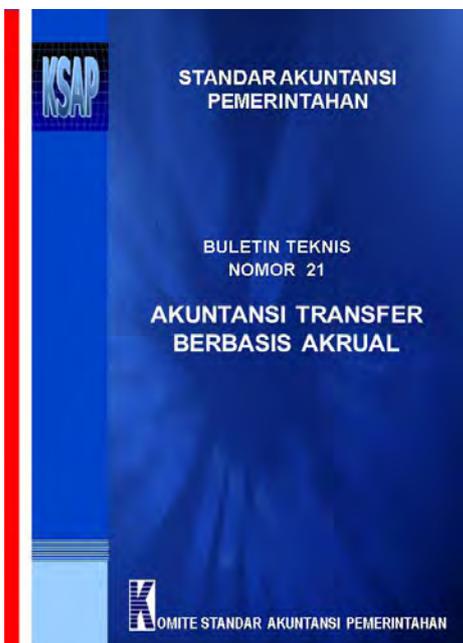
Penyusunan Interpretasi Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan

Pada tahun 2016, KSAP telah menetapkan 1 (satu) buah Interpretasi Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (IPSAP) Nomor 04 tentang Perubahan kebijakan Akuntansi dan Koreksi Kesalahan Tanpa Penyajian Kembali Laporan Keuangan. IPSAP ini disusun guna menghindari perbedaan penafsiran akan perlu tidaknya melakukan penyajian kembali laporan keuangan saat perubahan penerapan basis akuntansi dari Basis Kas Menuju Akrua ke Basis Akrua.

3

Penyusunan Buletin Teknis Standar Akuntansi Pemerintahan

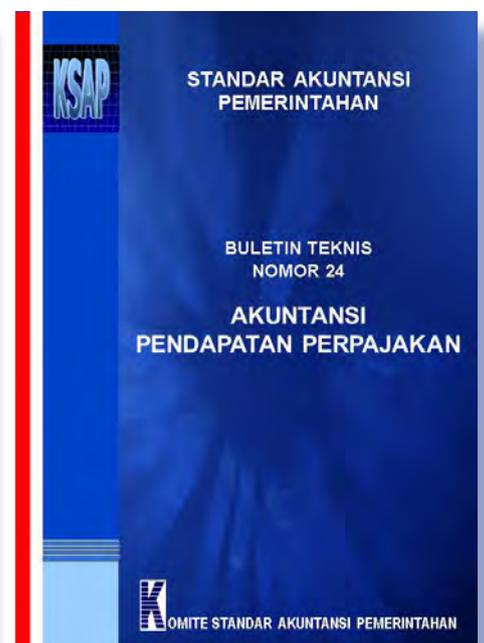
Dalam tahun 2016, KSAP telah menetapkan 3 (tiga) buah buletin teknis yaitu:



Buletin Teknis SAP No. 21: Akuntansi Transfer Berbasis Akrua



Buletin Teknis SAP No. 23: Akuntansi Pendapatan Non Perpajakan



Buletin Teknis SAP No. 24: Akuntansi Pendapatan Perpajakan.

Sampai dengan akhir tahun 2016, **KSAP telah menerbitkan 24 (dua puluh empat) buletin teknis** yaitu:

1. Buletin Teknis Nomor 01 tentang Penyusunan Neraca Awal Pemerintah Pusat;
2. Buletin Teknis Nomor 02 tentang Penyusunan Neraca Awal Pemerintah Daerah;
3. Buletin Teknis Nomor 03 tentang Penyusunan Laporan Keuangan Pemda Sesuai SAP dengan Konversi;
4. Buletin Teknis Nomor 04 tentang Penyajian dan Pengungkapan Belanja;
5. Buletin Teknis Nomor 05 tentang Akuntansi Penyusutan;
6. Buletin Teknis Nomor 06 tentang Akuntansi Piutang;
7. Buletin Teknis Nomor 07 tentang Akuntansi Dana Bergulir;
8. Buletin Teknis Nomor 08 tentang Akuntansi Utang;
9. Buletin Teknis Nomor 09 tentang Akuntansi Aset Tetap;
10. Buletin Teknis Nomor 10 tentang Akuntansi Belanja Bantuan Sosial;

11. Buletin Teknis Nomor 11 tentang Akuntansi Aset Tidak Berwujud;
12. Buletin Teknis Nomor 12 tentang Akuntansi Transaksi Dalam Mata Uang Asing;
13. Buletin Teknis Nomor 13 tentang Akuntansi Hibah;
14. Buletin Teknis Nomor 14 tentang Akuntansi Kas;
15. Buletin Teknis SAP No. 15 tentang Akuntansi Piutang Berbasis Akrua;
16. Buletin Teknis SAP No. 16 tentang Akuntansi Aset Tetap Berbasis Akrua;
17. Buletin Teknis SAP No. 17 tentang Akuntansi Aset Tak Berwujud Berbasis Akrua;
18. Buletin Teknis SAP No. 18 tentang Akuntansi Penyusutan Berbasis Akrua;
19. Buletin Teknis SAP No. 19 tentang Akuntansi Bantuan Sosial Berbasis Akrua;
20. Buletin Teknis SAP No. 20 tentang Akuntansi Kerugian Negara;
21. Buletin Teknis SAP No. 21 tentang Akuntansi Transfer Berbasis Akrua;
22. Buletin Teknis SAP No. 22 tentang Akuntansi Utang Berbasis Akrua;
23. Buletin Teknis SAP No. 23 tentang Akuntansi Pendapatan Nonperpajakan; dan
24. Buletin Teknis SAP No. 24 tentang Akuntansi Pendapatan Perpajakan.

Beberapa buletin teknis yang sampai dengan akhir tahun 2016 masih dalam proses finalisasi, yaitu:

1. Buletin Teknis tentang Akuntansi Dana Bergulir – Akrua;
2. Buletin Teknis tentang Akuntansi Badan Layanan Umum; dan
3. Buletin Teknis tentang Kebijakan Akuntansi.

4

Sosialisasi, Public Hearing dan Limited Public Hearing SAP Berbasis Akrua dan Buletin Teknis Baru SAP Berbasis Akrua

Dalam tahun 2016, sebagai amanat dari *High Level Meeting* yang dipimpin oleh Wakil Menteri Keuangan dan dihadiri oleh BPK RI, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Desa, Transmigrasi dan Daerah Tertinggal, BPKP, IAI, serta perwakilan dari Pemerintah Daerah dan Pemerintah Desa, KSAP ditugaskan untuk menyusun Standar Pelaporan Keuangan Pemerintah Desa.



Sebagai bagian dari *due process* penyusunan standar, KSAP melaksanakan *Limited Public Hearing* dan *Public Hearing* atas *draft* Standar Pelaporan Keuangan Pemerintah Desa pada tanggal 9 November 2016 dan 14 Desember 2016. Kegiatan *Limited Public Hearing* dan *Public Hearing* tersebut bertujuan untuk memperoleh tanggapan dan masukan dalam rangka penyempurnaan *draft* Standar Pelaporan Keuangan Pemerintah Desa.

Penyusunan SPKPD dilatarbelakangi bahwa desa memiliki kewajiban melakukan pengelolaan dan membuat pertanggungjawaban keuangan desa. Alokasi dana desa dari Pemerintah Pusat maupun pemerintah daerah menuntut perlunya akuntabilitas atas pengelolaan keuangan desa.



Suasana Public Hearing Standar Pelaporan Keuangan Desa, Gedung Dhanapala 2016



Pada tanggal 6 Desember 2016, KSAP menyelenggarakan Limited Public Hearing atas Konsep Publikasian Standar Akuntansi Pemerintahan tentang Akuntansi Aset Tak Berwujud.

Selain kegiatan penyusunan Standar Pelaporan Keuangan Pemerintah Desa dan Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan Akuntansi Aset Tak Berwujud, KSAP juga menyelenggarakan kegiatan sebagai berikut:

- Focus Group Discussion (Limited Public Hearing) IPSAP Perubahan Kebijakan Akuntansi dan Koreksi Kesalahan tanpa Pewajiban Penyajian Kembali Laporan Keuangan yang dilaksanakan pada tanggal 13 Januari 2016 di Jakarta;
- Focus Group Discussion (Limited Public Hearing) Konsep Publikasian Buletin Teknis tentang Pendapatan Non Perpajakan yang dilaksanakan di Jakarta pada tanggal 28 Maret 2016;

- *Focus Group Discussion (Limited Public Hearing)* Konsep Publikasian Buletin Teknis tentang Pendapatan Non Perpajakan dengan agenda utama membahas Akuntansi Pendapatan Non Perpajakan terkait Sumber Daya Alam dan Perizinan yang dilaksanakan di Jakarta pada tanggal 4 April 2016; dan
- *Focus Group Discussion (Limited Public Hearing)* Konsep Publikasian PSAP Nomor 06 tentang Akuntansi Investasi (Revisi 06) dengan Badan Pemeriksa Keuangan RI yang dilaksanakan di Jakarta pada tanggal 20 Juni 2016.



5 Pengembangan Sumber Daya Manusia KSAP

Tahun 2016, dalam rangka meningkatkan kemampuan personilnya, KSAP mengirim anggotanya untuk mengikuti seminar/ kongres/ konferensi baik di dalam maupun di luar negeri. Berikut beberapa kegiatan yang diikuti oleh KSAP:

- Sertifikasi IPSAS tanggal 7 dan 8 November 2016 di Jakarta.
- *Regional Public Sector Conference (RPSC)* ke-IV dan Konvensi Nasional Akuntansi (KNA) VIII yang diselenggarakan oleh Ikatan Akuntan

Indonesia di Bandung tanggal 8 dan 9 Desember 2016. KSAP diminta untuk mempresentasikan topik mengenai Akuntabilitas Pengelola Keuangan Negara Untuk Kesejahteraan Rakyat, Implementasi Akuntansi Berbasis Akrua di Sektor Publik, Catatan Setahun Perjalanan Penerapan Akuntansi Berbasis Akrua pada Pemerintah Daerah, Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan dan Pembangunan Desa, dan Akuntabilitas Pengelolaan BLU/BLUD.

6 Pemeliharaan Website KSAP

Dalam rangka memberikan informasi kepada publik mengenai organisasi KSAP dan produk standar akuntansi yang dihasilkan, KSAP telah membangun *website* KSAP dengan alamat:

<http://www.ksap.org>

Selamat Datang Tahun 2017

KSAP Komite Standar Akuntansi Pemerintahan

Beranda Berita ▾ Agenda ▾ Publikasi ▾ Tentang KSAP ▾ Konsultasi ▾ English Corner ▾

Bahasa Indonesia ▾

Tautan

- Direktorat Jenderal Perbendaharaan
- Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia
- Ikatan Akuntan Indonesia
- International Federation of Accountants
- Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia
- Kementerian Dalam Negeri
- Kementerian Keuangan

Meta

- Masuk
- RSS Entri

PUBLIKASI

Website ini dikelola oleh Sekretariat KSAP sejak Juli 2004. Pemeliharaan *Website* ditujukan untuk memublikasikan seluruh produk yang dihasilkan KSAP, artiket-artikel, kegiatan KSAP, dan berbagai informasi penting lainnya yang diperlukan para pengunjung. Pada Tahun 2016 telah dilakukan penyempurnaan konten *website* KSAP tersebut, dimulai dengan *update* profil KSAP, *update* produk KSAP yang meliputi Bultek, Bunga Rampai dan Laporan Tahunan KSAP.

KSAP menerima pertanyaan atas permasalahan yang dihadapi oleh para pengguna standar, selanjutnya KSAP memberikan solusi atas permasalahan yang ditanyakan. Atas penyelenggaraan *helpdesk* ini telah disusun Buku Bunga Rampai Studi Kasus Akuntansi Pemerintahan yang memuat pertanyaan/permasalahan dan jawaban/pemecahan permasalahan seputar implementasi SAP.

Tahun 2016 KSAP telah menjawab 25 (dua puluh lima) pertanyaan dari para pemangku kepentingan yang terkompilasi dalam:

- Buku Bunga Rampai SAP Semester I yang berisikan 12 Pertanyaan dan Jawaban KSAP; dan
- Buku Bunga Rampai SAP Semester II yang berisikan 13 Pertanyaan dan Jawaban KSAP.

Tabel. I

**BUNGA RAMPAI STUDI KASUS AKUNTANSI PEMERINTAHAN
TAHUN 2016
(UNTUK PERIODE BULAN JANUARI S.D. JUNI)**

No.	Tujuan	Instansi	Perihal
1	Direktur Jenderal Kekayaan Negara	Kementerian Keuangan	Akuntansi Subsequent Expenditure atas Aset Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS)
2	Direktur Jenderal Perbendaharaan	Kementerian Keuangan	Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2015
3	Sekretaris Daerah	Pemerintah Provinsi Bali	Fatwa Terkait Penganggaran dan Pelaporan Dana BOS Pada Pemerintah
4	Sekretaris Daerah	Pemerintah Provinsi Bali	Pengakuan Pendapatan LO atas PKB dan BBNKB
5	Kepala DPPKA	Pemerintah Kabupaten Kulonprogo	Penjelasan KSAP
6	1. Dirjen Perbendaharaan 2. Dirjen BKD	Kemenkeu Kemendagri	Penyajian Lembar Muka Laporan Keuangan Tahun 2015 Sesuai dengan IPSAP Nomor 04
7	Inspektur	BNP2TKI	Penyajian Utang Kepada Pihak Ketiga pada Laporan Keuangan BNP2TKI Tahun 2015
8	Kepala DPKAD	Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur	Penyajian Transfer/Hibah Tunai yang Diterima oleh Unit Kerja
9	Kepala DPPK	Pemerintah Kabupaten Bandung	Penjelasan tentang IPSAP II
10	Sekretaris Daerah	Pemerintah Kota Cirebon	Tanggapan terhadap Penghapusan Piutang Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Perdesaan dan Perkotaan
11	Kepala BPKA	Pemerintah Kabupaten Jember	Penerapan Penyusutan Aset Tetap Pemerintah Kabupaten Jember
12	Wakil Bupati	Pemerintah Kabupaten Dharmasraya	Penilaian Tanah untuk Jalan



Tabel. II

**BUNGA RAMPAI STUDI KASUS AKUNTANSI PEMERINTAHAN
TAHUN 2016
(UNTUK PERIODE JULI S.D. DESEMBER)**

No.	Tujuan	Instansi	Perihal
1	Kepala DPPKAD	Pemerintah Kabupaten Semarang	Akuntansi Laporan Arus Kas
2	Direktur Pengelolaan Kas Negara	Ditjen Perbendaharaan - Kementerian Keuangan	Penerapan Suku Bunga Negatif atas Rekening Penempatan Pemerintah di Bank Indonesia
3	Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Pemerintah Kabupaten Wonogiri	Penjelasan Kegiatan Padat Karya dan Pemberangkatan Transmigrasi
4	Kepala BPKAD	Pemerintah Kabupaten Barito Kuala	Pendapat KSAP tentang Penerapan Penyusutan
5	Walikota	Pemerintah Kota Makassar	Penjelasan Terkait Penyajian Aset Pulau Kecil
6	Kepala DPKAD	Pemerintah Kota Bandung	Penilaian Aset Tetap
7	Kepala BPKAD	Pemerintah Kabupaten Buleleng	Penyajian LK BLU
8	Kepala DPPKAD	Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya	Penyusutan dan Kapitalisasi Aset
9	Bupati	Pemerintah Kabupaten Cilacap	Kekurangan Kas Daerah
10	Ketua	APPDI	Pengakuan Piutang PKB dan BBNKB
11	Kepala DPPKAD	Pemerintah Kota Surakarta	Penyusutan Aset dalam Kondisi Rusak Berat
12	Sekretaris Daerah	Pemerintah Kabupaten Cirebon	Kebijakan Akuntansi
13	Direktur Jenderal Kekayaan Negara	Kementerian Keuangan	Penilaian Kembali Aset Tetap

8

Pelayanan Publik

Pada tahun 2016, KSAP telah memenuhi beberapa permintaan dari berbagai instansi antara lain dari instansi pemerintah pusat/daerah, lembaga pendidikan, dan lembaga publik lainnya untuk menjadi narasumber tentang SAP, yaitu:

1. Evaluasi sistem penganggaran dalam rangka mendukung penyusunan laporan keuangan berbasis akrual oleh Direktorat Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan;
2. Diklat teknis pengelolaan keuangan berbasis akrual oleh Badan Pendidikan dan Pelatihan Provinsi Jawa Tengah;
3. Koordinasi permasalahan dalam pengelolaan keuangan daerah oleh Badan Pemeriksa Keuangan RI;
4. Pelatihan pembekalan SAP Berbasis Akrual oleh pemerintah Provinsi Riau;
5. *In House Training* (IHT) Penyusunan Laporan Keuangan Daerah dan Laporan Keuangan SKPD Berbasis Akrual oleh Pemerintah Kota Kotamobagu;
6. Sosialisasi SAP Berbasis Akrual di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Buleleng;
7. Bimtek Implementasi PP Nomor 71 Tahun 2010 dalam Penyusunan laporan Keuangan oleh Pemerintah Kota Padang;
8. FGD Identifikasi kebutuhan Informasi atas Penyaluran dana Desa dan Alokasi dana Desa oleh Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan, Kementerian Keuangan;
9. FGD Penyusunan Kebijakan Akuntansi di Lingkungan Kemenristek dan Pendidikan Tinggi;
10. *Workshop* PSAP Nomor 13 tentang BLU oleh Badan Litbang Kementerian ESDM;
11. Sosialisasi SAP Berbasis Akrual oleh Pemerintah Kota Banda Aceh;
12. Reviu Kebijakan Akuntansi dan Sistem Akuntansi Berbasis Akrual oleh Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya;
13. *Workshop* Pengelolaan Keuangan Daerah Berbasis Akrual dan Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah oleh Pemerintah Kabupaten Karanganyar;
14. Reviu Kebijakan Akuntansi Berbasis Akrual oleh Pemerintah Provinsi Jawa Barat;
15. *Workshop* Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrual terkait TKDD dalam rangka Peningkatan Kualitas Pengelolaan Keuangan Negara dan Keuangan Daerah oleh Kementerian Keuangan; dan
16. Rapat Koordinasi Kebijakan Akuntansi Piutang PNPB dan Utang Kepada Pihak Ketiga oleh Kementerian Kominfo.

9

Komunikasi Publik

Sepanjang tahun 2016 KSAP menerima tamu dari beberapa *stakeholders* Pemerintah Pusat maupun pemerintah daerah yang mengkonsultasikan beberapa permasalahan terkait penerapan standar. Diantaranya adalah:

1. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Banten
2. Pemerintah Provinsi Jawa Barat
3. Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan
4. Pemerintah Kabupaten Purworejo
5. Pemerintah Kabupaten Aceh Tamiang
6. Pemerintah Kabupaten Buleleng
7. Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah
8. Pemerintah Kabupaten Balangan
9. Pemerintah Kota Bandung
10. Pemerintah Kota Padang
11. Serta beberapa Pemerintah Kabupaten dan Kota dari berbagai wilayah di Indonesia.





Menerima Tamu dari Gorontalo & Cilacap Tgl 21 September 2016



Menerima Tamu dari Gorontalo & Cilacap Tgl 21 September 2016



Menerima Tamu dari Pemprov Sumsel Tgl 21 September 2016

10

Kegiatan Internasional

Beberapa kegiatan internasional yang diikuti oleh KSAP sepanjang tahun 2016 diantaranya:

- Seminar ANAO – BPK RI – CPA Australia yang diselenggarakan pada tanggal 31 Maret 2016 di Jakarta.
- Pertemuan Tahunan *International Public Sector Accounting Standards Board Consultative Advisory Group (IPSASB CAG)* yang diselenggarakan di Stellenbosch Town Hall, Cape Town, Afrika Selatan, pada tanggal 5 Desember 2016. IPSASB CAG dibentuk pertama kali pada tahun 2016 dan salah satu anggotanya yaitu Firmansyah N. Nazaroedin yang juga merupakan salah satu anggota Komite Kerja KSAP.



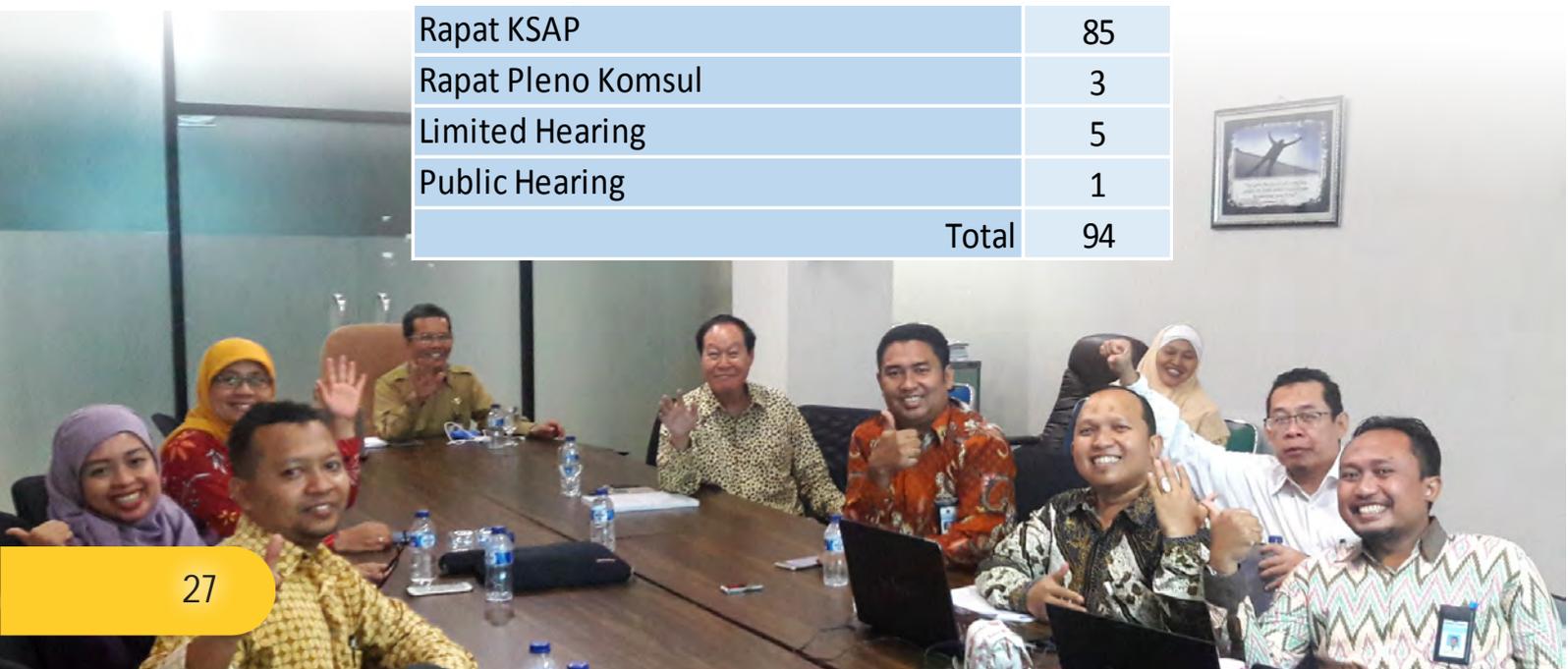
11

Lain-Lain (Penyelenggaraan Kesekretariatan)

Sepanjang tahun 2016 sekretariat KSAP telah memfasilitasi kegiatan KSAP. Berikut rekapitulasi kegiatan KSAP yang difasilitasi oleh sekretariat:

Tabel III : Rekapitulasi Kegiatan KSAP Tahun 2016

Rapat KSAP	85
Rapat Pleno Komsul	3
Limited Hearing	5
Public Hearing	1
Total	94



C. Aspek Keuangan

Untuk melaksanakan kegiatan tahun 2016, KSAP mendapatkan alokasi dana APBN sebesar Rp2.979.605.000 yang tertuang dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) KSAP – Kementerian Keuangan Nomor DIPA-015.08.1.439165/2016 tanggal 7 Desember 2015. Dari anggaran tersebut, KSAP telah merealisasikan sebesar 96.3% dari pagu anggaran yakni Rp 2.870.291.502.

Berikut ini adalah rincian anggaran dan realisasi belanja KSAP Tahun Anggaran 2016:



Tabel I.V. : Rincian dan Realisasi Belanja KSAP Tahun Anggaran 2016

Kode Jenis Belanja	Uraian Jenis Belanja	Anggaran	Realisasi	Persentase (%)
51	Belanja Pegawai	-	-	-
52	Belanja Barang	Rp2.979.605.000	Rp2.870.291.502	96.3%
53	Belanja Modal	-	-	-
Jumlah		Rp2.979.605.000	Rp2.870.291.502	96.3%

D. Lain-lain

Penyusunan Standar Pelaporan Keuangan Pemerintah Desa merupakan fokus KSAP di Tahun 2016 yang membutuhkan waktu dan perhatian lebih dari KSAP. Bagaimana menyusun suatu pedoman standar yang nantinya akan dilaksanakan oleh Desa seluruh Nusantara merupakan hal yang tidak mudah, terlebih lagi atas bermacamnya peraturan dan bentuk atas pengelolaan keuangan desa yang selama ini telah berjalan.

Di tahun ini pula, KSAP tengah menyusun suatu buku yang berisikan sejarah KSAP. Bagaimana KSAP awal dibentuk, tujuan serta semangat KSAP beserta sejarah produk-produk KSAP, merupakan inti dari muatan buku sejarat tersebut. Diharapkan dengan adanya buku sejarah KSAP, para pemangku kepentingan akan mendapat gambaran secara utuh mengenai sejarah akuntabilitas dan transparansi keuangan Pemerintah Indonesia yang diwujudkan dalam Standar Akuntansi Pemerintahan oleh Komite Standar Akuntansi pemerintahan.

E. Kendala dan Strategi Pemecahannya

Pada tahun 2016, terdapat PSAP yaitu PSAP Investasi revisi 2016 dan beberapa buletin teknis yang direncanakan dapat diselesaikan dan diterbitkan namun sampai dengan akhir tahun 2016 target tersebut belum dapat dicapai. Hal ini disebabkan oleh proses penetapan RPKM yang harus dijalani dan KSAP memerlukan kajian yang lebih mendalam terhadap substansi buletin teknis yang cukup kompleks serta fokus KSAP terhadap pelayanan konsultasi para pemangku kepentingan dan Penyusunan Standar Pelaporan Keuangan Pemerintah Desa yang bersifat segera.

Penyusunan produk KSAP yang digunakan untuk mendukung pelaksanaan implementasi SAP Berbasis AkruaI terkendala oleh proses penyusunan yang memerlukan pendalaman yang kompreherensif dan waktu yang relatif cukup lama. Pendalaman ini diperlukan sebagai sikap kehati-hatian KSAP dalam menyusun suatu standar akuntansi. Termasuk juga dalam kendala tersebut adalah banyaknya waktu yang tersita untuk membalas surat konsultasi atas implementasi SAP Berbasis AkruaI.

BAB V
RENCANA KERJA
TAHUN 2017



Tahun 2017, KSAP merencanakan melakukan kegiatan sebagai berikut:

• Penyusunan PSAP dan IPSAP

Pada tahun 2017, KSAP akan melakukan finalisasi penyusunan *draft* Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP) yang terdiri dari:

1. PSAP Peristiwa Setelah Periode Pelaporan
2. PSAP Akuntansi Pengaturan Bersama (*Joint Arrangement*)
3. PSAP Akuntansi Dana untuk Entitas Non Pemerintah Penerima dana APBN/APBD

Sesuai dengan proses baku penyusunan SAP (*due process*) dan dalam rangka finalisasi draf SAP, KSAP meminta serta memperhatikan pertimbangan dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan tahapan ini merupakan tahap akhir penyempurnaan substansi, konsistensi, koherensi maupun bahasa. Selanjutnya KSAP akan memproses ke Kementerian Keuangan untuk penetapan PSAP melalui Peraturan Menteri Keuangan.

Disamping itu KSAP merencanakan menyusun IPSAP dan/atau PSAP lainnya yang dibutuhkan guna mendukung Implementasi SAP berbasis akrual Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Tujuan dari penyusunan IPSAP adalah untuk memberikan kesamaan penafsiran atas hal yang telah/belum diatur dalam SAP.

• Penyusunan Buletin Teknis Standar Akuntansi Pemerintahan

Pada tahun 2017, KSAP akan melakukan finalisasi penyusunan/penerbitan buletin teknis SAP Berbasis Akrual. Tujuan dari penyusunan buletin teknis adalah untuk memberikan penjelasan yang mendalam tentang SAP Berbasis Akrual dalam menyusun laporan keuangan, sehingga para pengguna dapat memahami dan melaksanakan SAP dengan baik.

Buletin teknis SAP Berbasis Akrual yang akan diterbitkan adalah:

1. Buletin Teknis tentang Akuntansi Dana Bergulir – Akrual,
2. Buletin Teknis tentang Akuntansi Badan Layanan Umum, dan
3. Buletin Teknis tentang Kebijakan Akuntansi.

Pada tahun 2017, tidak menutup kemungkinan KSAP menyusun buletin teknis baru, di luar daftar di atas, yang dibutuhkan dalam rangka implementasi akuntansi berbasis akrual.

• *Public Hearing* dan *Limited Public Hearing* SAP Berbasis Akrual dan Buletin Teknis Baru SAP Berbasis Akrual

Pada Tahun 2017, KSAP berencana memfinalkan beberapa PSAP dan Bultek, dan sesuai *due process* maka *limited public hearing* dan/atau *public hearing* diperlukan dalam rangka dengar pendapat publik guna memperoleh tanggapan dan masukan dalam rangka penyempurnaan *draft* SAP dengan mengundang pihak-pihak dari kalangan akademisi, praktisi, pemerhati akuntansi pemerintahan, dan masyarakat yang berkepentingan terhadap SAP.

• Pengembangan SDM KSAP

Untuk menunjang pelaksanaan tugasnya, khususnya dalam menyusun SAP Berbasis Akrual, KSAP perlu meningkatkan kemampuan personilnya. Selain melakukan pengkajian standar dan praktik akuntansi baik internasional maupun di Indonesia, KSAP juga mempunyai rencana mengirimkan para anggotanya untuk mengikuti seminar/kongres/konferensi baik di dalam maupun di luar negeri.

• Pemeliharaan Website KSAP

Sejak tahun 2004, KSAP telah membuat *website* KSAP yang berguna untuk mengkomunikasikan kepada publik mengenai kondisi, kegiatan dan output KSAP. Agar *website* tersebut tetap mengkomunikasikan informasi yang *up to date* yang berkaitan dengan KSAP kepada publik, maka KSAP perlu memelihara *website*-nya. Para pengunjung dapat men-*download* dan mengajukan pertanyaan melalui email KSAP yang tersedia dalam situs www.ksap.org.

- **Pemeliharaan *Helpdesk* dan Penyusunan Bunga Rampai Studi Kasus Akuntansi Pemerintahan**

KSAP dalam menjalankan fungsi *Helpdesk* akan terus melakukan tugasnya pada tahun 2017. Diharapkan dari penyelenggaraan *helpdesk* ini akan dibuat suatu Buku *Frequently Asked Question (FAQ)*/Buku Bunga Rampai Studi Kasus Akuntansi Pemerintahan yang memuat pertanyaan/permasalahan dan jawaban/pemecahan permasalahan seputar implementasi SAP.

- **Sosialisasi dan Pelayanan Publik**

Pada tahun 2017, KSAP direncanakan akan mengadakan sosialisasi dalam rangka pelayanan publik mengenai SAP Berbasis AkruaI dan buletin teknis baru SAP Berbasis AkruaI. Kegiatan pelayanan yang dapat berupa sosialisasi, pengajaran, konsultasi, dan lain-lain kepada instansi pemerintah pusat/daerah, lembaga pendidikan, dan lembaga publik lainnya ini diharapkan dapat meningkatkan pemahaman para pengguna SAP serta mampu menerapkannya dalam penyusunan laporan keuangan.

- **Audiensi dengan Komite Konsultatif dan atau Menteri Keuangan.**

Audiensi dengan komite Konsultatif dan atau dengan Menteri Keuangan merupakan salah satu perwujudan pertanggungjawaban kegiatan KSAP kepada Presiden melalui Menteri Keuangan

- **Lain-lain**

Penyelenggaraan kegiatan kesekretariatan untuk memberikan dukungan terhadap kinerja KSAP di tahun 2017.



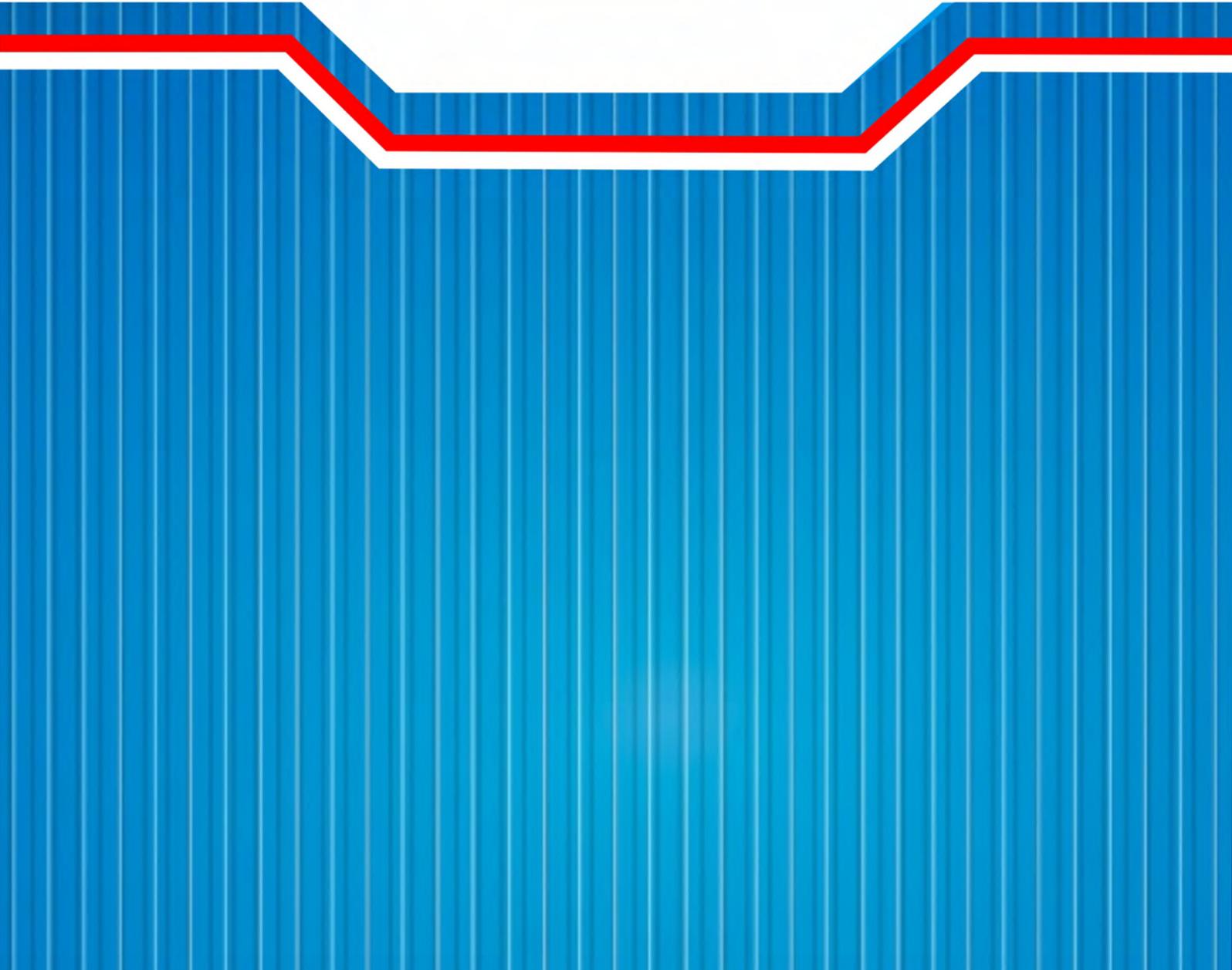
BAB VI

PENUTUP



Laporan Tahunan 2016 ini merupakan laporan pertanggungjawaban KSAP dan diharapkan dapat dijadikan sebagai media evaluasi, khususnya bagi KSAP dan pihak-pihak yang berkepentingan. Masukan dari berbagai pihak baik mengenai substansi standar, interpretasi, buletin teknis, bantuan implementasi, program sosialisasi dan hal-hal lainnya dapat diberikan kepada KSAP agar di masa mendatang KSAP dapat meningkatkan kinerjanya dalam mengembangkan dan menyusun standar akuntansi pemerintahan serta memberi dukungan teknis implementasi SAP sehingga dapat mendukung transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara.





Komite Standar Akuntansi Pemerintahan

Sekretariat :

Gedung Prijadi Praptosuhardjo III, Lantai 2
Jl. Budi Utomo No. 6
Jakarta 10710 - Indonesia
Telepon/Faksimile : +62 21 3524551

Website: <http://www.ksap.org>
Email : sekretariat@ksap.org